UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sporadik Berdasarkan Alas Hak Adat Letter C Yang Telah Beralih Melalui Surat Hibah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)
Mohammad Indra Avin Maulana, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris.* Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Asmara, Galang, et al. *Hukum Administrasi Negara.* Depok: Rajawali Pers, 2024.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi.* Surabaya: Peradaban, 2007.

Harahap, Anwar Sadat, Hardi Mulyono, dan Ahmad Laut Hasibuan. *Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam.* Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Indonesia, isi dan pelaksanaannya.* Jakarta: Djambatan, 2005.

Isretno, Evita. *Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian Tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintahan*. Jakarta: Cintya Press, 2020.

Istanto, F. Sugeng. *Penelitian Hukum.* Yogyakarta: CV. Ganda, 2007.

Kansil, C.S.T., Engelien R. Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Kurniati, Nia, et al. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sporadik Berdasarkan Alas Hak Adat Letter C Yang Telah Beralih Melalui Surat Hibah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)
Mohammad Indra Avin Maulana, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Ngani, Nico. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Pamuji, Kadar, et.al. *Buku ajar hukum administrasi negara*. Purwokerto: Unsoed Press,2023.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Sembiring, Julius. *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 2015.

Sri Widiarty, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

Sumardjono, Maria. S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Sumarja, FX. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Lampung: Universitas Lampung, 2015.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.

Tehupeiory, Aartje. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Depok: Penebar Swadaya, 2012.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.* Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2017.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sporadik Berdasarkan Alas Hak Adat Letter C Yang Telah Beralih Melalui Surat Hibah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)
Mohammad Indra Avin Maulana, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sporadik Berdasarkan Alas Hak Adat Letter C Yang Telah Beralih Melalui Surat Hibah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)
Mohammad Indra Avin Maulana, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2025–2029.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr perihal tindak pidana korupsi dengan terdakwa Zaiful Yusri, S.H.

Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2172/Pdt.G/2024/PA.Tng perihal gugatan oleh Diah Ayu Susiantini Binti Soesmono.

Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 34/Pdt.G/2025/PN.Krs perihal gugatan oleh Muhamad digantikan oleh istri yaitu Sri Idayati.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018 perihal Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 PK/Pid.Sus/2020 perihal Peninjauan Kembali oleh terpidana Zaiful Yusri, S.H.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557 K/Ag/2025 perihal Kasasi yang diajukan oleh Kartono bin S. Kamsir *cum suis* atas Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2172/Pdt.G/2024/PA.Tng.

Skripsi dan Tesis

Aditama, Purna Noor. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”, Tesis., Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Kurniawan, Yoga. "Legalitas Akta di Bawah Tangan sebagai Dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Kantor

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sporadik Berdasarkan Alas Hak Adat Letter C Yang Telah Beralih
Melalui Surat Hibah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Kantor
Pertanahan Kota Probolinggo)
Mohammad Indra Avin Maulana, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pertanahan Kota Makassar)." Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa, 2017.

Octavianus, Haposan Bemfie. "Pendaftaran Tanah Pertama Kali Yang Didasarkan Pada Akta Jual-Beli Dibawah Tangan (Analisa Terhadap Kasus Di Kelurahan Grogol Utara)", Tesis., Universitas Indonesia, 2010.

Rivoni, Ahmad. "Pendaftaran Tanah Berdasarkan Alas Hak Hibah di Bawah Tangan Pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi", Tesis., Universitas Andalas, 2022.

Susanti, Nova. "Pendaftaran Tanah Pertama Kali Berdasarkan Jual Beli Dibawah Tangan Di Kabupaten Padang Pariaman", Tesis., Universitas Andalas, 2017.

Jurnal dan Artikel lainnya

Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati. "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 142–152.

Ainullah. "Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan." *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman* 3, no. 1 (Juni 2017): 86–97.

Afriansyah, M. Adli, Rosmidah, dan Syamsir. "Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2477–2486.

Arifin, Iing R. Sodikin. The Land Titles History, Types and The Acquisition: Object of Land Disputes Former Western Rights. *Presentasi disampaikan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta, 6 Oktober 2017.

Azizah, Siti Nur, Muhammad Rifqi Hidayat, dan Ahmad Fauzi. "Kedudukan Yuridis Letter C dalam Sistem Pendaftaran Tanah Indonesia dan Mekanisme Konversinya Menjadi Sertifikat Hak Milik." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 6 (2025): 2873–2880.

Dewantara, Yuni Putri, Michelle Caroline Hadi, dan Dave David Tedjokusumo. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019)." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 30, no. 3 (Oktober 2024): 20–34.

Farhani, Athari. "Roadmap Masa Depan Indonesia Melalui Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Bagi Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat". *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 6, No. 2 (Juni 2022): 25-39, https://doi.org/10.15408/adalah.v6i2.26766.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sporadik Berdasarkan Alas Hak Adat Letter C Yang Telah Beralih Melalui Surat Hibah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)
Mohammad Indra Avin Maulana, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Firnanda, Adetya, Clarisa Fitri, dan Fahmi Ardianto. “Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau dari Asas Kemanfaatan dan Aksesibilitas.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, No. 2 (Agustus 2021):170-180.

Gunanegara. “Kekuatan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebagai Alas Hak Pengurusan Hak atas Tanah.” *Law Review* XXI, No. 3 (Maret 2022):341-362.

Izzah, Merly Markhamatul, Johan Erwin Isharyanto, dan Junaidi. "Peran dan Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Atas Putusan Nomor 1316/Pdt.G/2023/PA.Jepr)." *Notary Law Research* 7, no. 1 (2025): 137–147.

Kurniawan, Indra, Indyah Hartami Santi, dan Wahyu Dwi Puspitasari. "Sistem Informasi Geografi Pemetaan Lokasi Tanah Letter C Desa Menggunakan Mapbox Berbasis Web." *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika (JISTI)* 7, no. 2 (2024): 232–242

Mujiburohman, Dian Aries. “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).” *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, No. 1 (Mei 2018):89-101.

Perkas, Rama, dan F.X. Arsin Lukman. “Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Merujuk Kepada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 4 (Juli 2021): 10049.

Pramono, D. “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 12, No. 3 (Desember 2015):248-258.

Putra, Julio, dan Firman Muntaqo. "Tanggung Jawab Pidana Kantor Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Menimbulkan Kerugian Negara." *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 36–51.

Ramadhani, Febri. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Recital Review* 2, no. 2 (2020): 100–114. https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135.

Sahrina, Alfi, Purwanto, Fatiya Rosyida, Devy Prasetyono, Ivan Sulistio, dan Ciptaningrat Erdi Pamungkas. "Digitalisasi Dokumen Pertanahan Desa Berbasis WebGIS di Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang." *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 12 (2023): 4299–4306.

Septianingsih, K.A., I.N.P. Budiartha, dan A.A.S.L. Dewi. “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 3 (2020):336-340.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sporadik Berdasarkan Alas Hak Adat Letter C Yang Telah Beralih Melalui Surat Hibah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo dan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)
Mohammad Indra Avin Maulana, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Setiawan, Eri, Indyah Hartami Santi, dan Saiful Nur Budiman. "Sistem Pengelolaan dan Pengamanan Arsip Data Letter C Desa (Studi Kasus: Kantor Desa Gondang)." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 6, no. 2 (2022): 655–666.

Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik". *administrasi law & governance journa*l 2, no.3 (2019): 541–570.

Suardana, I Wayan. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia". *Media Bina Ilmiah* 17, no. 9 (April 2023): 2281-2290.

Sugeng, Tedjo Asmo. "Fungsi Buku Tanah Desa sebagai Landasan Yuridis Awal Alat Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah." *CERMIN: Jurnal Penelitian* 5, No. 2 (Desember 2021):385-393.

Surbakti, Futri Wicaksono Br, Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, dan Muhammad Sofyan Pulungan. "Cancellation of Notarial Deeds Made by Notaries Done Unauthorized and Against the Law (Case Study in Tangerang City)." *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 3 (2021): 340–354.

Internet

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. "Progres Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap". https://www.atrbpn.go.id/ptsl (diakses pada tanggal 16 Februari 2025).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. "Mengenal Asas Kontradiktur Delimitasi, Kunci Kepastian Batas Bidang Tanah." https://www.atrbpn.go.id/berita/mengenal-asas-kontradiktur-delimitasi-kunci-kepastian-batas-bidang-tanah (diakses 9 Juli 2026).

Santoso, Topo. "Batas Tegas Administrasi dan Pidana: Membedah Putusan MKRI Nomor 66/PUU-XXIV/2026 tentang Frasa 'Kerugian Keuangan Negara'." Instagram post. https://www.instagram.com/p/DXyO9gEmSjB/ (diakses 20 Mei 2026).